

PETA PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Peta Bumi Islam di Indonesia

Dalam membahas “Peta Bumi Islam Indonesia” ini, kita ambil bisa memulainya dengan menggunakan dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut penglihatan politik, yaitu dengan mengambil ukuran peran umat Islam dalam pendewasaan politik di Indonesia. *Kedua*, dari sudut penglihatan pemahaman mereka akan agama Islam, yang secara “agak ketinggalan zaman” membagi umat Islam menjadi dua kelompok, yaitu golongan modernis dan golongan tradisional. Kedua sudut pandang ini masih sangat relevan untuk mengetahui kondisi umat Islam di Indonesia sampai saat ini.

Pertama, dari Sudut Penglihatan Politik

Konon, menurut yang sampai kepada kita melalui “info-info”, peta bumi politik Islam di Indonesia mengenal pembagian kelompok menjadi enam. Pembagian ini kasar, dan hanya merupakan suatu “*bird’s eye view*” saja.

Pertama, entah kelompok apa namanya atau bagaimana mereka menamakan diri, mengingatkan kita pada gerakan *al-Takfir wa al-Hijrah* di Mesir yang ultra-ekstrem itu. *Al-Takfir* artinya mencukupkan segala kesalahan dan dosa yang telah terjadi, baik disengaja atau tidak sengaja, dan menyudahi sampai di sini saja! Jadi *al-takfir* bermakna *tawbat-an nashūh-an*, keputusan yang mengakhiri segala kekeliruan dan kesalahan. Dalam Q 3:193

diajarkan doa: “*Oh Tuhan... dan kaffirī ‘annā (artinya: hentikan dan cukupkan sekian saja) dosa-dosa kami....*”

Tetapi, pada kelompok ekstrem di Mesir itu *takfir* tersebut juga dipraktikkan menurut maknanya yang lain, yaitu “mengkafirkan” orang lain di luar mereka sendiri. Ini sekaligus konsekuensi makna pertama, sebagaimana pandangan kaum Khawarij yang menyatakan bahwa orang yang berdosa dan bertahan dalam dosa itu dianggap sebenarnya telah kafir. Kesejajaran makna ini juga tercermin dalam perkataan *al-hijrah* yang berarti berpindah, meninggalkan *dār al-ḥarb* ke *dār al-Islām*, yang dalam praktik tidak lain ialah berarti berpindah meninggalkan masyarakat (Islam) pada umumnya dan bergabung dengan mereka. Lagi-lagi kaum Khawarij klasik beranggapan bahwa siapa saja yang tak bergabung dengan mereka adalah berada dalam *dār al-ḥarb*, jadi halal darahnya. Tanpa menyebut siapa yang termasuk dalam kelompok ini, tampaknya jelas ada kelompok model Khawarij kuno ini dalam kalangan umat kita.

Kedua ialah kelompok revolusioner, yaitu yang tidak percaya pada pendekatan-pendekatan konstitusional dan legal untuk memperjuangkan ide-ide mereka, tetapi hanya mempercayai cara-cara radikal dan revolusioner. Mereka tidak sampai mempunyai sikap suka mengkafirkan orang lain dari kalangan *ahl al-qiblah*—yakni umat Islam pada umumnya (istilah kaum Sunnah dan Jama‘ah)—tetapi jelas mereka tidak mempercayai golongan di luar mereka sendiri, dan menganggap dirinya sebagai paling benar dan mujahid tulen.

Ketiga ialah kelompok konstitusionalis, yang umumnya merupakan warisan kejayaan politik Islam di Indonesia zaman Masyumi. Kalau kita kaji secara historis Masyumi ini memang menarik dan unik. Mula-mula dibuat dan didirikan Jepang—dari sinilah muncul tuduhan, khususnya yang dilontarkan oleh kaum intelektual pendidikan Belanda, bahwa Masyumi “berbau fasis”—sebagai pelaksanaan strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam dalam perang Asia Timur Raya. Jadi, seperti mobil Toyota dan arloji Seiko, Masyumi adalah “*made in Japan*”, atau lebih tepatnya “*made by*

Japanese". Pada dua dasawarsa terakhir ini "*made in Japan*" adalah jaminan mutu! Tetapi, kita tidak tahu lima dasawarsa yang lalu. Yang jelas, ketika pada November 1945 diadakan kongres umat Islam dan disepakati hendak membentuk sebuah partai Islam, nama Masyumi dipertahankan oleh "orang-orang lama" dan kaum "Kolaborator" Jepang yang terdiri dari para pemimpin NU dan Muhammadiyah (tentu dengan pertimbangan interes sendiri). Namun, usaha ini ditentang oleh para intelektual (berpendidikan Barat), karena secara naluri mereka ini lebih senang orang Barat daripada orang Jepang, sebagaimana telah diperhitungkan Jepang sendiri. Tetapi, para pemimpin Muslim "*westernized*" yang berkumpul dalam PII (Pelajar Islam Indonesia) ini kalah suara, dan jadilah Masyumi nama partai Islam pertama dan satu-satunya pada zaman permulaan kemerdekaan. Yang menarik di sini, wadah Masyumi buatan Jepang yang bagi para intelektual (didikan Barat) "berbau fasis" itu akhirnya nyaman juga terasa pada mereka, malah mereka mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak begitu menyenangkan bagi penghuni aslinya. NU keluar dari Masyumi, dan Muhammadiyah menyatakan berhenti sebagai "anggota istimewa".

Nah, berkat pimpinannya yang terbaratkan itulah maka Masyumi tampil sebagai partai dengan konsep-konsep dan ide-ide politik modern serta melahirkan kaum konstitusionalis. Apalagi pendidikan para pemimpinnya itu memang di bidang hukum—banyak yang menyandang gelar *Meester in de Rechten*. Jadi, sebenarnya mereka ini adalah kaum modernis dan "westernis", sama dengan kaum modernis dan "westernis" Indonesia yang lain dari kalangan nasionalis, sosialis, Kristen, dan lain-lain. Dari sudut keperluan pada modernisasi dan reformasi Islam dan masyarakat Indonesia, peranan Masyumi itu positif, konstruktif, dan malah cukup mengagumkan. Cuma, mungkin karena pengalaman traumatis berbagai kekecewaan dan kegagalan politik mereka, orang-orang Masyumi menjadi kehenggapan penyakit oposisionalisme yang agak kelewatan. Mereka juga kehilangan perspektif masalah-masalah lingkungannya, khususnya masalah sosial politik. Di sini juga

mereka semakin kehilangan relevansi terhadap tuntutan zaman. Labih payah lagi, para pewaris sahnya telah lupa akan peranan Masyumi sebagai partai modern dan konstitusionalis, dan yang diingat hanya perjuangannya yang menggebu-gebu, namun gagal untuk mendirikan negara Islam di Konstituante (secara konstitusional!). Mereka para eks Masyumi ini oleh kelompok pertama dan kedua tadi sekarang dipandang sebagai kelompok yang lemah yang telah kehilangan elan vitalnya, ibarat Gatutkaca *ilang gapité*.

Keempat adalah kelompok kaum akomodasionis. Ini istilahnya Allen Samson, seorang ahli ilmu politik yang menyesali mengapa menjadi ahli ilmu politik dan sekarang pindah ke profesi lain sebagai ahli hukum setelah belajar kembali. Terang yang dimaksud kelompok akomodasionis ini adalah orang-orang Islam yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini diwakili oleh mereka yang masuk partai, meskipun tidak semuanya berasal dari partai. Tetapi, juga oleh pribadi-pribadi siapa saja yang bekerja sama dengan pemerintah.

Kelima adalah kelompok oportunis, yang dianggap lebih jelek daripada golongan akomodasionis. Siapa yang dimaksud sebagai golongan oportunis ini? Sulit juga membuat *pin point*. Mungkin yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang Islam yang mengaku berjuang untuk Islam tetapi sebenarnya tidak yakin akan ajaran Islam. Orang-orang ini menunjukkan tanda-tanda “lain di perkataan lain di perbuatan”. Bisa juga kelompok ini dinamakan golongan hipokrit. Orang-orang ini memandang Islam dan umat Islam secara palsu, karena lebih melihatnya sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya saja. Menurut Eric Hoffer, orang macam inilah musuh dalam selimut yang benar-benar harus diwaspadai. Tetapi, justru karena “dalam selimut” maka kita tidak, atau sulit, mengetahui siapa mereka itu sebenarnya. Hanya Tuhan—dan yang bersangkutan sendiri—yang tahu.

Kelompok *keenam* adalah golongan “*silent majority*”. Justru karena “*silent*”, maka meskipun mereka banyak sekali, mereka tak berfungsi apa-apa. Malah ujud mereka sebagai kelompok adalah atomistis, masing-masing berdiri sendiri, seperti ungguan pasir dengan masing-

masing butirnya yang lepas. Jadi, mereka adalah kelompok yang tak terikat (*uncommitted*), dan membentuk massa mengambang. Para “pejuang” di atas biasa melihat “*silent majority*” ini sebagai rakyat atau umat pengikut mereka, atau orang-orang yang memerlukan pimpinan mereka. Maka terjadilah rebutan klaim. Namun, si “*silent majority*” ini tetap saja keadaannya, seperti semua tak berubah.

Kedua, dari Sudut Pemahaman Umat Islam pada Ajaran Agamanya

Dari sudut persepsi umat Islam pada agamanya ini, secara agak ketinggalan zaman, umat Islam di Indonesia kita klasifikasikan menjadi golongan tradisional dan golongan modernis. Biasanya yang ditunjuk sebagai golongan tradisional adalah NU dan yang modernis adalah eks Masyumi dan keluarganya (“keluarga Bulan Bintang”). Jelas, untuk saat ini jurang pemisah antara keduanya semakin menciut. Nilai-nilai yang dulu menjadi karakteristik golongan modernis sudah lama diterima oleh golongan tradisional. Dan golongan modernis semakin menunjukkan sikap-sikap yang lebih konservatif daripada golongan tradisional, khususnya dalam bidang politik. Karena perbedaan antara keduanya dalam berbagai hal mengabur, kita sekarang tidak lagi mudah membicarakannya tanpa simplifikasi keadaan seperlunya.

Kalau kita kaji kembali secara lebih mendalam, pembagian di atas itu rasanya ada sesuatu yang salah, dan kesalahan itu cukup prinsipil. Pembagian itu mencerminkan naluri yang serta merta memandang umat Islam selalu mereka yang berada di luar pemerintahan atau sistem kenegaraan. Asal disebut “umat Islam” maka apriori yang terbayang adalah mereka yang berada di luar pemerintahan, sejak dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Padahal, dalam tubuh pemerintahan itu sendiri banyak pribadi-pribadi yang sangat berjasa pada Islam dan umat Islam.

Sering kita dengar bahwa pemerintahan Indonesia didominasi oleh kaum priyayi dan abangan (menurut pengertian Geertz).

Oleh karena itu, mereka bukanlah umat Islam, sebab umat Islam adalah yang (menurut Geertz) disebut golongan santri. Mungkin saja secara analitis gampang-gampang masih berguna juga menggunakan pembagian seperti pada buku *Religion of Java* itu. Tetapi, coba perhatikan: secara geneologis para kiai yang memimpin pesantren-pesantren di seluruh Jawa ini adalah para priyayi. Konon pesantren pertama di Jawa adalah pesantren Tegal Sari di Ponorogo, yang berdiri di atas tanah merdikan hadiah dari Kesunanan Surakarta, dan dipimpin oleh seorang kiai priyayi Ki Ageng Hasan Bestari. Model Tegal Sari dilanjutkan dan mengilhami berdirinya Tremas, dan Tremas mengilhami berdirinya Tebuireng, dan Tebuireng mengilhami seluruh sistem pesantren di pulau Jawa. Jadi, “kebangkitan” kaum santri dengan pesantren-pesantrennya itu dipelopori oleh kaum priyayi.

Pola ini terulang lagi pada Muhammadiyah, gerakan reformasi Islam yang paling besar dan merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang paling modern di dunia. Para pemimpin dan pengikut (mula-mula) organisasi ini hampir semuanya terdiri dari kalangan kaum priyayi Jawa, antara lain karena memang program-program Muhammadiyah dan pandangan-pandangan keagamaan serta kemasyarakatan nya lebih cocok untuk lapisan orang-orang Jawa yang sudah sedikit banyak “makan” pendidikan modern Belanda.

Begitu pula para pemimpin Syarikat Islam yang hebat-hebat itu, kebanyakan mereka terdiri dari kaum priyayi, seperti diwakili oleh HOS Tjokroaminoto sendiri. H. Agus Salim pun adalah seorang “priyayi” (dari Minang), malah secara legal dia adalah “orang putih” yang mempunyai hak sama dengan orang putih beneran (yakni orang-orang Belanda). Mungkin kurang tepat jika H. Agus Salim disebut “protégé”-nya Snouck Hourgrounje, tetapi sarjana Belanda inilah yang ingin mensponsori Salim untuk bisa pergi ke negeri Belanda. Dan karena keinginannya ini tidak bisa terwujud, maka dia akhirnya mensponsori Salim untuk menjadi pegawai konsulat Belanda di Jeddah. Salim inilah yang—setelah

kembali dari Jeddah—menyebarkan intelektualisme Islam dan mendapatkan pasarannya di kalangan para priyayi muda Jawa yang belajar di Perguruan Tinggi Kolonial. Selanjutnya para priyayi Jawa ini yang nanti tampil menjadi pemuka Islam yang dianggap sementara orang dan kelompok, paling ideal, yaitu para pemimpin intelektual (bukan para kiai) Masyumi.

Tetapi, perkaranya adalah soal keseimbangan, *a matter of proportion*. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan latar belakangnya yang kebetulan tidak sesuai dengan selera kita. Sebagai perbandingan kita ambil contoh salah seorang sahabat Nabi yang sangat berjasa dalam memperluas wilayah Islam yaitu Khalid ibn Walid. Khalid ini adalah bekas seorang kafir Makkah yang fanatik dan dengan penuh kebencian ingin membunuh Nabi, dan niatnya ini hampir berhasil dalam peperangan Uhud. Tetapi, setelah menjadi Muslim—boleh dikata, keislamannya ini “*in the last minute*”, (agak telat)—Khalid disambut oleh Nabi, dan kecakapan perangnya yang dulu pernah mengancam jiwa Nabi malah dimanfaatkan untuk Islam, bahkan ia diberi gelar kehormatan *sayf-u ’l-Lāh* (pedang Allah).

Jika dalam menilai mereka ini kita lakukan secara benar dan adil, maka seharusnya kita tidak mempunyai halangan apa-apa untuk mengakui dan menghargai adanya pemimpin Islam dalam pemerintahan dari kalangan priyayi dan abangan itu. Janganlah dilihat apa yang tidak mereka lakukan untuk agama, tetapi hargailah apa yang telah mereka lakukan. Ini ada hubungannya dengan usaha mengukuhkan dan mempermanenkan Islam di Indonesia. Lihat saja salah satu aspek yang paling gampang, yaitu usaha pendirian masjid-masjid. Jelas sekali pertumbuhan masjid itu sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional, seperti halnya dengan ibadah haji. Pemerintahan sekarang, langsung dan tidak langsung adalah pemerintahan yang sebegitu jauh paling banyak menghasilkan berdirinya masjid-masjid. Dan mengusahakan masjid-masjid itu dibuat berupa bangunan-bangunan permanen.

Mengapa masjid-masjid permanen itu penting? Dalam menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita renungkan terlebih dahulu

fenomena berikut ini: Islam datang di Jawa lewat Jawa Timur, lalu memperoleh kekuasaan politik di Jawa Tengah, dan dari sana disebarkan ke Jawa Barat. Tetapi, sekarang di Jawa Barat secara keseluruhan relatif lebih baik keislamannya daripada Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mengapa? Salah satu teori yang mungkin bisa menjawab “kejanggalan” ini adalah, bahwa keadaan itu berbanding terbalik dengan populasi candi-candi dan bangunan-bangunan non-Islam lainnya. Karena Jawa Barat boleh dikatakan tidak memiliki candi, maka Islamnya kuat. Sebab, seperti halnya dengan setiap monumen, candi berfungsi mengawetkan suatu pola budaya atau ideologi. Jawa Tengah paling banyak memiliki candi, dan Jawa Timur di tengah-tengah. Dari sini jelas bahwa ada keterkaitan erat antara bangunan-bangunan permanen dengan usaha “mengawetkan” pola budaya atau ideologi di suatu wilayah. Makanya Masjid Istiqlal itu penting, sebagaimana Monas dan Baiturrahim. Istiqlal [kemerdekaan] merupakan simbol pengakuan peranan masjid dan Islam dalam merebut kemerdekaan, dan Baiturrahim melambangkan bahwa Indonesia ini, *in the last analysis, at least religiously*, adalah sebuah negara Muslim, bukan semata-mata karena mayoritas penduduknya Muslim.

Ini semua harus disadari umat Islam sendiri akan makna historisnya bagi Indonesia dan apa dampaknya bagi masa depan negara ini yang Insya Allah akan kita bicarakan lebih lanjut di sini. Pokoknya, dari kalangan umat ini harus ditumbuhkan kelompok orang-orang Muslim yang sadar diri, *self conscious*. Kesadaran ini harus didasari pemahaman Islam yang menyeluruh, tidak parsial. Para da'i dan muballigh sering menyutir firman *udkhulū fi 'l-silm-i kaffah*, tetapi agaknya mereka kurang memahami sendiri maknanya, apalagi menangkap wujud nyatanya. Pemahaman menyeluruh Islam itu selain memang menjadi tuntutan bagi umat Islam juga akan menghasilkan kedewasaan berpikir dan beragama. Dari sini kita bisa menampilkan wajah Islam yang lebih manusiawi (*fithri*) seperti diklaim sendiri oleh Islam.

Sikap terhadap Pancasila

Mungkin pada saat sekarang ini ada sementara orang menganggap bahwa membicarakan hubungan antara Islam dengan Pancasila terasa sangat membosankan, karena sudah terlalu sering dibahas. Tetapi, justru ini menunjukkan bahwa memang ada masalah dalam hal ini. Ada lima poin hipotesis yang dapat kita temukan di sini:

1. Seandainya kita bisa kembali ke masa lampau dan mengulangi sejarah, kita akan membuat Piagam Jakarta tidak memuat rumusan Pancasila dengan tujuh kata-katanya yang “terkenal” itu. Alasannya adalah bahwa kata “Syariat” seperti yang maknanya tersirat dalam tujuh kata-kata itu menunjukkan adanya bias pemahaman pada Islam yang terlalu berat ke orientasi (hukum) fiqih. Padahal Islam tidak hanya mencakup fiqih, malah hukum fiqih bukan inti ajaran Islam. Inti itu didapatkan dalam ajaran tentang “*taqwā min-a ‘l-Lāh-i wa ridlwān-an*” (takwa dan rida Tuhan) yang disebut al-Qur’an (9:109) sebagai dasar kegiatan hidup yang benar. Jadi, seharusnya bunyi sila pertama itu ialah “Takwa dan rida Tuhan Yang Mahaesa”. Mungkin juga malah cukup dengan “Ketuhanan Yang Mahaesa” seperti yang ada sekarang, dengan pengertian bahwa ungkapan itu menunjuk pada semangat dan jiwa yang sama dengan ungkapan al-Qur’an “*taqwā min-a ‘l-Lāh-i wa ridlwān-an*”. Kemudian kesepakatan bahwa Piagam Jakarta itu menjadi rencana “*Declaration of Independence*” Indonesia ditepati, lalu dipatri bahwa filsafat yang dikandungnya itu sudah permanen, tidak boleh dipersoalkan lagi. Tetapi, kita tidak bisa mengubah kenyataan sejarah; Piagam Jakarta tetap memuat tujuh kata-kata itu, sekalipun tidak digunakan untuk deklarasi kemerdekaan sebagaimana direncanakan.
2. Pengandaian kedua adalah yang mengenai hasil sidang 18 Agustus 1945 itu. Setelah rumusan Moh. Hatta yang menghilangkan

tujuh kata-kata itu diterima, mestinya dinyatakan (dan diterima) sebagai rumusan yang permanen, tidak perlu dipersoalkan lagi. Jadi, tidak perlu ada rencana hendak diadakan sidang pembuat Undang Undang Dasar permanen seperti yang dijanjikan Bung Karno. Dari pengandaian ini, kita akan berjalan sebagai bangsa Indonesia yang sejak dari berdirinya sudah sepakat akan dasar negaranya, seperti bangsa dan negara Amerika Serikat dengan “*Declaration of Independence*”-nya.

3. Pengandaian ketiga, tentu saja ini juga tidak terjadi. Jika kelompok Islam pada waktu itu, seperti dinasehatkan Moh. Hatta, tidak terus dengan perjuangan mereka yang hendak mendirikan negara dengan berdasarkan Islam, tetapi cepat mengambil inisiatif kembali ke Pancasila, maka paling tidak ini dapat menutup lowongan inisiatif bagi PKI. Tetapi, ini juga tidak terjadi, lalu keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.
4. Dekrit itu sendiri—dari sudut pandangan kelompok tertentu kalangan politisi Islam—mestinya harus dianggap membuat dasar dan filsafat negara lebih baik daripada yang ada dalam rumusan 18 Agustus 1945 itu. Sebab, ia menyebutkan Piagam Jakarta sebagai suatu dokumen historis yang menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD ’45. Dekrit itu diterima dengan aklamasi DPR pilihan rakyat. Jadi, kelompok Islam pun (termasuk Masyumi) menerimanya. Seharusnya Presiden Soekarno menanggapi positif penerimaan aklamasi DPR itu dan meneruskan bisnis politik Republik menurut konstitusi baru—yaitu UUD ’45 dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen—seperti dikehendaki Masyumi. Tetapi, yang ia lakukan justru membubarkan DPR pilihan rakyat, dan membentuk DPRGR yang lalim itu. Inilah permulaan mala-petaka yang berakhir dengan meletusnya Gestapu/PKI.
5. Orde Baru sekarang ini, sepanjang ucapan para pemimpinnya, bertekad hendak melaksanakan UUD ’45 beserta Pancasila secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang diamanatkan

dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut. Eksperimen-eksperimen untuk itu memang sedang dilaksanakan, meskipun pada pelaksanaannya ada sebagian yang tidak konsisten. Mestinya semua unsur masyarakat dan bangsa Indonesia menyertai eksperimen-eksperimen itu secara “aktif”. Maka, timbul pertanyaan yang terbit dari rasa khawatir, apakah umat Islam Indonesia—dalam hubungannya dengan Pancasila—pada masa Orde Baru yang berumur hampir 30 tahun ini akan kehilangan tongkat untuk kesekian kalinya? Rasanya tidak. Kita berharap kita tidak lagi salah dalam membaca keadaan. Nabi saw bersabda, “*Lā yuldagh-u ’l-Muslim-u fī juhr-in wāhīdin marratayn*” (seorang Muslim tidak boleh tertusuk dalam satu lobang sampai dua kali).

Namun, di sini kita ingin menegaskan pendirian kita bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka dan demokratis. Ia harus dicegah jangan sampai meluncur menjadi rumusan-rumusan dogma yang mati dan kaku. Jelas kita melihat Pancasila dari sudut pandangan kita sebagai orang-orang Muslim, dan kita mempertimbangkannya dari sudut pertimbangan ajaran-ajaran Islam. Tidak ada orang yang berhak melarang kita berbuat begitu, kecuali kalau Islam bisa dihapuskan dari Indonesia dan kita atau anak cucu kita dipaksa masuk agama atau pandangan hidup lain. Tetapi, menurut keyakinan kita, usaha itu akan membuat pelakunya berhadapan dengan Tuhan Yang Mahaesa. Kalau mereka juga berkeyakinan dilindungi Tuhan (tepatnya, suatu “tuhan”), maka biarkanlah “tuhan” mereka itu berhadapan dengan Tuhan Yang Mahaesa.

Selain hal-hal historis politis tersebut, sebagian umat Islam—melalui para pemimpinnya—memang mempunyai persepsi yang salah pada Pancasila dalam hubungannya dengan agama Islam. Kesalahan ini tampaknya sekarang sudah sangat berkurang, dan kita boleh merasa optimis untuk masa mendatang.

Keislaman adalah Keindonesiaan, dan sebaliknya

Sikap yang tepat terhadap Pancasila akan menutup kesenjangan antara konsep keumatan dan kenegaraan, khususnya karena mayoritas penduduk negara kita beragama Islam. Dengan tertutupnya kesenjangan itu maka dapat diharapkan pada kaum Muslimin—yang diwakili para pemimpin umat—akan tumbuh rasa ikut memiliki negara ini dengan sepenuh-penuhnya. Kondisi ini selanjutnya akan melandasi perkembangan hubungan antara Islam dengan Indonesia, yaitu bahwa keislaman adalah keindonesiaan, dan keindonesiaan adalah—sebagian besar—keislaman.

Seorang sastrawan mengatakan kurang lebih begini, “Keindonesiaan itu belum ada, sebab kita masih dalam proses membentuk atau menemukannya. Dari semua unsur budaya yang ada di kepulauan Indonesia, dua yang paling mungkin untuk dijadikan titik-tolak pengembangan keindonesiaan, yaitu keislaman dan kejawaan. Dan saya memilih kejawaan”. (Perlu diketahui bahwa sastrawan itu sendiri beragama Islam dan bukan orang Jawa, meskipun tinggal di sebuah kota di Jawa). Dalam menanggapi pernyataan sastrawan ini, kita berharap bahwa cetusan pikirannya itu dibuat berdasarkan suatu renungan mendalam atas dasar alasan-alasan yang benar, dan timbul karena adanya sikap yang *concerned* pada persoalan bersama yang sangat besar dan penting itu.

Tetapi, kita tidak tahu alasan-alasan yang dia ajukan untuk memilih kejawaan sebagai landasan keindonesiaan. Namun, sebelum tahu alasan-alasan itu, kita ingin mengemukakan argumen bahwa keislamanlah yang paling tepat untuk dijadikan landasan pengembangan keindonesiaan itu. Atau, malah lebih tepatnya, keislaman itulah yang kini sedang berkembang untuk menjadi unsur pokok keindonesiaan. Dan jika Pancasila yang telah menjadi “perjanjian luhur” bangsa Indonesia itu kita perhitungkan—sebagaimana seharusnya—maka keindonesiaan itu dalam bentuk formalnya akan berupa pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, seperti yang pada saat sekarang ini telah dikehendaki dan dijangonkan orang. Tetapi, itu tidak melawan argumen kita bahwa

keindonesiaan itu akan terisi keislaman atau, bisa juga dikatakan keislaman itu yang untuk sebagian besar akan menjadi wujud pengisian dan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.

Pendapat kita pertama-tama didasari kenyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas mutlak penduduk Indonesia dan, lebih penting lagi, penganutnya menyebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Pengaruh konkret pertama kenyataan keislaman di Nusantara ini adalah diterimanya bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional Indonesia. Bukan saja karena bahasa Melayu adalah bahasa yang paling luas menyebar ke seluruh daerah pantai kepulauan Nusantara (yang penyebarannya itu sendiri dibawa oleh agama Islam, agama para pedagang interinsuler waktu itu), tetapi juga karena bahasa Melayu—disebabkan proses “peragiannya” oleh nilai-nilai Islam para pemakai utamanya—adalah bahasa Austronesia yang paling mendukung cita-cita egalitarianisme Islam. Sedangkan egalitarianisme itu sendiri merupakan salah satu tuntutan sistem kenegaraan modern.

Tidak ditetapkan bahasa Jawa sebagai Bahasa Nasional—meskipun suku Jawa merupakan suku terbesar dan paling kuasa—bukanlah karena “toleransi” atau “kebaikan hati” orang Jawa dan bukan pula sikap mereka yang “demi persatuan bangsa”, melainkan terutama karena bahasa Jawa—sama halnya dengan bahasa Sunda, Madura, dan Bali—adalah bahasa yang tidak cocok untuk suatu kebutuhan negara modern, disebabkan wataknya yang tidak egaliter. Ini dikemukakan tanpa bermaksud mengingkari jasa orang-orang Jawa, khususnya para ulama dan umara Jawa abad pertengahan, yang memelopori penggunaan huruf Arab untuk menuliskan bahasa daerah. Seperti diketahui, kebiasaan ulama dan umara Jawa itu kemudian ditiru oleh suku-suku lain yang Muslim, khususnya orang-orang Melayu, sehingga sampai saat ini huruf Arab untuk bahasa Melayu itu disebut huruf Jawi. Sedangkan orang Jawa sendiri menyebutnya huruf Pego. Penggunaan “huruf Jawi” itulah yang sangat mempercepat penyebaran bahasa Melayu ke seluruh wilayah Nusantara sehingga menjadi *Lingua Franca* terpenting sejak berabad-abad yang lalu. Jadi, wujud konkret pertama paralelisme keindonesiaan dan keislaman

adalah adanya bahasa nasional Indonesia yang mengacu pada bahasa Melayu. Perlu juga kita ketahui bahwa bahasa Melayu/Indonesia adalah *Lingua Franca* orang-orang Muslim Asia Tenggara.

Tetapi, kesejajaran antara keislaman dan keindonesiaan tidaklah terbatas hanya pada bahasa nasional itu. Sumbangan Islam yang lebih besar adalah dalam bentuk peranan dan fungsinya sebagai penyeragam budaya Nusantara, yang memungkinkan dipermudahnya komunikasi antarkelompok etnis dari daerah penghunian yang secara geografis berjauhan. Tanpa keberadaan Islam yang menyebar di pelosok Nusantara, akan sulit untuk menumbuhkan persepsi kultural yang sama atau hampir sama antara orang-orang yang dari suku bangsa yang berlainan. Memang benar bahwa penyatuan Nusantara di bawah administrasi Hindia Belanda mempunyai pengaruh langsung yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia merdeka yang meliputi daerah “Sabang-Merauke”. Tetapi, tanpa keislaman yang merata di seluruh pelosok tanah air, kesatuan dan persatuan Indonesia akan menjadi sebuah bangunan politik yang rapuh.

Kalau kita kaji lebih lanjut, penglihatan yang menyejajarkan keindonesiaan dengan keislaman mengisyaratkan pengakuan akan absahnya pandangan yang melihat perlunya membuat interpretasi—jika bukan adaptasi—ajaran-ajaran universal Islam untuk bisa memenuhi tuntutan-tuntutan nyata Indonesia. Dalam kaitan dengan ini, patut kita renungkan makna penegasan dalam al-Qur’an bahwa Tuhan tidak pernah mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya (Q 14:4). Dan agaknya yang dimaksud bahasa di sini bukan hanya dalam batasan linguistik, tetapi mencakup segi-segi kultural yang membuat seorang utusan Tuhan bisa berkomunikasi dengan rakyatnya.

Kaum Santri adalah “WASP” Indonesia

Kembali kita menggunakan perkataan “santri” *for the sake of convenience* (untuk mudahnya). Perkataan itu, setelah dipoles oleh

Geertz, menunjuk pada segmen orang Jawa yang pandangan hidupnya, secara keseluruhan lebih kosmopolit daripada segmen bandingannya (tapi bukan lawannya), yakni kaum abangan. Oleh karena itu, kaum santri itu, menurut pengertian Geertz, adalah segmen orang-orang Jawa yang paling banyak mempunyai unsur-unsur kesamaan kultural dengan kelompok-kelompok Indonesia non-Jawa dibanding dengan kaum abangan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa kesantrian sesungguhnya merupakan ciri kultural seluruh penduduk Indonesia yang Muslim, kecuali orang-orang Jawa abangan.

Bahkan, sebagai implikasinya lebih lanjut, segmen Jawa santri mempunyai lebih banyak persamaan dengan segmen-segmen Indonesia non-Jawa daripada dengan segmen internnya sendiri, yaitu segmen Jawa abangan. Inilah salah satu dasar klaim bahwa kesantrian adalah lebih universal—dalam arti meliputi seluruh wilayah Indonesia—daripada “abanganisme”, meskipun banyak peninjau luar menganggap “abanganisme” sebagai titik-tolak sekularisme modern di Indonesia.

Jadi, dalam kaitannya dengan keindonesiaan yang paralel dengan keislaman di atas, secara lebih khusus dapat diungkapkan dengan perkataan lain bahwa keindonesiaan, setidaknya untuk masa depan yang tidak terlalu jauh, adalah paralel dengan kesantrian.

Lebih tegas lagi, mungkin tidak terlalu gegabah jika dikatakan bahwa dalam perkembangannya Indonesia sedang menjurus menjadi sebuah “negara santri”. Ini tidak berarti kepancasilaan Indonesia terhapus atau terganti, tetapi nilai-nilai asasi Pancasila itu akan mengejawantah dan mengaktualisir diri melalui dan dalam bentuk nilai-nilai kesantrian yang kosmopolit dan nasional. Sehingga, jika kita gunakan paradigma sebuah negara sekular demokratis, contohnya Amerika Serikat—yang sering secara tidak resmi disindir sebagai negara *WASP* (*White Anglo-Saxon Protestants*)—maka Republik Indonesia yang berpancasila dan ber-UUD ’45 ini adalah sedang tumbuh menjadi negara santri. Jadi para santri akan merupakan “*WASP*”-nya Indonesia.

Analisa ini akan terbukti kebenarannya jika kita mengaitkannya dengan persoalan etika nasional. Betapapun indah dan bagusya sebuah rumusan ideologi negara seperti Pancasila itu, namun agar berfungsi ia harus diterjemahkan ke dalam dimensi-dimensi moral dan etis yang hidup nyata dan mempengaruhi tingkah laku rakyat dan pemerintah. Ia harus tumbuh menjadi apa yang oleh Robert N. Bellah disebut sebagai “*civil religion*”. Dan betapapun seseorang atau kelompok mencoba merumuskan perincian nilai-nilai itu dengan menggunakan sumber-sumber ide abstrak, namun dalam proses sosialisasinya, nilai-nilai itu akan “*nyantol*” pada apa yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat. Di sini, dalam penghitungan dari berbagai segi, nilai-nilai kesantrian adalah yang paling relevan. Dan dalam perspektif pembahasan di sini pertumbuhan bahasa nasional tadi merupakan suatu bentuk nyata betapa nilai kebangsaan atau persatuan nasional telah mewujudkan dirinya dengan cara “*nyantol*” pada “kesantrian” (dalam hal ini kita bisa ambil contoh penggunaan bahasa Melayu sebagai acuan bagi bahasa nasional).

Lebih jauh, penglihatan ini di dukung oleh gejala-gejala nasional yang kini menjadi awal kecenderungan besar (“*mega trend*”, istilah Naisbitt) Indonesia, yaitu proses penantrian semua sektor kehidupan. Tidak dapat diingkari bahwa memang ada gejala-gejala yang merupakan “*counter*” penantrian. Tetapi, jika kenyataan historis yang telah diuraikan di atas bisa dijadikan petunjuk, maka dapat dikatakan bahwa proses santrinisasi ini telah melaju tanpa bisa dikendalikan oleh siapa pun. Dan benar-benar merupakan “*mega trend*” Indonesia yang sesungguhnya. Sekarang, tinggal bagaimana kita mendorongnya agar melaju lebih cepat. [❖]